

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia dalam mengkaji laporan keuangan pemerintah adalah suatu hal yang sangat menarik, dikarenakan tuntutan terhadap akuntabilitas lembaga publik semakin menguat. Laporan keuangan merupakan bagian penting sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan perlu diperhatikan karena mempengaruhi pengambilan keputusan para stakeholder (Putri et al., 2021).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan juga menjelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai harus memenuhi sifat atau karakteristik kualitatif, seperti Relevan, artinya laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Keandalan, artinya Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Dapat dibandingkan, artinya pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan secara relatif atau membandingkan laporan keuangan dengan periode yang lampau. Dapat dipahami, artinya Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik masih mempunyai permasalahan dan keraguan akan kebenarannya, seperti pada laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kuningan dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya masih kurang optimal. Sebanyak 60% laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Dan Kota di Wilayah Jawa Barat mengalami permasalahan dalam pemeriksaan BPK, sehingga ini mengakibatkan permasalahan pula dalam ketidakefektifan pengungkapan laporan keuangan.

Salah satu yang mengalami permasalahan tersebut terjadi pada pemerintah daerah Kabupaten Kuningan mengenai penatausahaan dan pelaporan aset tetap masih belum memadai. Hal ini menunjukkan pengungkapan mengenai aset tetap mengalami masalah, sehingga kurangnya memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan yang diakibatkan oleh pengungkapan laporan keuangan yang tidak dilakukan secara lengkap dan memadai oleh setiap pemerintah (LHP BPK).

Pada laporan hasil pemeriksaan dimana BPK masih menemukan sejumlah masalah dalam pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan, BPK memberikan sejumlah catatan temuan kepada beberapa Kabupaten atau Kota di Jawa Barat salah satunya yaitu pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, yaitu temuan pada permasalahan aset tetap, baik

terkait penatausahaan maupun pemanfaatannya yang sampai sekarang masih banyak yang belum tuntas. Banyaknya temuan audit BPK akan berdampak kepada tingkat penyajian informasi yang harus disajikan ataupun dijelaskan penda terkait pengelolaan keuangan daerah, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan.

Berdasarkan opini audit yang dicapai pada laporan keuangan daerah Kabupaten Kuningan TA 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1

Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Kuningan TA 2018-2022

No.	Tahun	Opini Audit	Catatan Opini
1.	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan atau Dengan Catatan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah • Pengelolaan asset tetap belum tertib • Biaya belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan
2.	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan atau Dengan Catatan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah • Pengelolaan asset tetap belum tertib • Kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan
3.	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan

		Dengan Paragraf Penjelasan atau Dengan Catatan	perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan asset tetap belum tertib • Pengelolaan kas pada bendahara OPD dan bendahara BOS belum tertib • Kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan
4.	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan atau Dengan Catatan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah • Pengelolaan asset tetap belum tertib • Pengelolaan kas pada bendahara OPD dan bendahara BOS belum tertib • Kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan
5.	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah • Penganggaran Pendapatan Asli Daerah tidak terukur • Biaya belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan

Sumber: <https://kuningankab.go.id/home/dokumen-lakip-satuan-kerja-perangkat-daerah/>

Temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan pada tahun 2022 tersebut mencerminkan belum memadainya pengendalian

asset. Tentunya bila hal tersebut dibiarkan terus menerus, maka akan berdampak pada penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan masih lemah dalam mengelola keuangan daerah, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan masih belum relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Hal ini menjadi fenomena karena pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dana publik secara efektif, efisiensi, ekonomis dan juga patuh terhadap semua aturan serta mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara tepat waktu dan akuntabel.

Suatu pemerintahan diharapkan agar tidak hanya mengejar opini WTP tetapi juga harus mengejar perbaikan pada pengelolaan *good governance* dan pelayanan kepada masyarakat. Pemikiran ini sejalan dengan adanya tuntutan *good governance* dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam kerangka otonomi memerlukan prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih (Mardiasmo, 2002).

Selain itu standar akuntansi pemerintahan merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan BPK akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit.

Sementara itu dalam penyusunan laporan keuangan juga diharapkan berpedoman pada standar yang telah ditentukan. Di mana berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menjelaskan tentang pengertian dari SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan keuangan pemerintah. Dalam hal ini, permasalahan dari akuntansi pemerintahan itu dikarenakan kemampuan pemerintah dalam menyusun dan melaporkan keuangan yang masih terbatas. Hal ini disebabkan karena tidak

memadainya sumber daya manusia yang menangani pengelolaan dan pelaporan keuangan di pemerintah. (www.Warsidi.com).

Menurut Philadelphia et al., (2020) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang akan dibahas dalam penelitian ini, faktor pertama yaitu *Good Governance*. *Good governance* adalah pemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. *Good governance* menjadi salah satu alat ukur atau patokan bagi stakeholder dalam mengambil keputusan terutama keputusan berinvestasi. Sorotan utama masyarakat pada sektor publik atau pemerintahan adalah mengenai tata kelola keuangan negara. Pemerintah dituntut untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan bersih, sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan tercapainya tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai stakeholder dari Negara.

Beberapa penelitian penelitian yang dilakukan Philadelphia (2020), Masitoh et al., (2020) dan Stirilita & Andayani (2021) memperoleh hasil bahwa *good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun perbedaan hasil penelitian yang diperoleh Sari (2022) dan Alsaifullah (2022) memperoleh hasil bahwa *good governance* berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan menurut Philadelphia et al., (2020) yaitu standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintah adalah aturan yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010). Standar akuntansi pemerintahan harus diterapkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai

ketentuan yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan standar yang menjamin laporan keuangan disusun memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para penggunanya.

Beberapa penelitian penelitian yang dilakukan Philadelphia (2020), Stirilita & Andayani (2021) dan Sari (2022) memperoleh hasil bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun perbedaan hasil penelitian yang diperoleh Apriansyah et al., (2020) dan Tegor et al., (2021) memperoleh hasil bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan menurut Philadelphia et al., (2020) yaitu sistem pengendalian internal. Menurut PP No.60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal adalah suatu dalam kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapainya atau sebuah terwujudnya sebuah organisasi yang secara efektif dan efisien yang dapat dilakukan pemerintah daerah sehingga dapat menyakinkan pada masyarakat bahwa pemerintah daerah dapat bekerja sesuai dengan apa dapat menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi kepentingan masyarakat setempat. Perlu adanya sistem pengendalian internal pemerintah untuk diterapkan di dalam suatu pemerintahan guna untuk mengurangi penyimpangan dalam pelaksanaan pelaporan keuangan sehingga nantinya dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas. Jika pengendalian internalnya kurang baik, maka akan sulit untuk mengidentifikasi kecurangan selama proses penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya pengendalian internal pada suatu organisasi, maka seluruh proses kegiatan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya suatu tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien akan terealisasi, sehingga *good governance* dapat terwujud (Kusaeri et al., 2022).

Beberapa penelitian penelitian yang dilakukan Saputra et al., (2020), Putri et al., (2020) dan Fathia et al., (2020) memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun perbedaan hasil penelitian yang diperoleh Ardianto & Eforis (2019)

dan Philadelphia et al., (2020) memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yaitu: Pertama, menambahkan variabel independen yaitu sistem pengendalian internal, karena dengan adanya sistem pengendalian internal maka dapat mencegah adanya kecurangan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kedua adalah objek penelitian, dimana objek penelitian ini adalah SKPD Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan latar belakang, fenomena gap dan research gap yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kuningan)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Bagaimana pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan fakta dan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh penerapan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis, untuk lebih jelasnya dapat dipaparkan sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan literatur akuntansi yang telah ada dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan bagaimana pengaruh penerapan *good governance*, standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat dijadikan perbandingan dengan peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah/Pemberi Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan bacaan serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan wawasan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian yang sejenis dan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan serta pemikiran dalam penelitian lebih lanjut.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman dalam hal pengembangan wawasan dari informasi yang diperoleh, menambah pengalaman penulis dalam bidang penelitian, serta dapat dijadikan bekal untuk memasuki dunia kerja.

